

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN  
PADA MASA PEMERINTAHAN  
PRESIDEN MOON JAE IN TERHADAP JEPANG  
DALAM KASUS COMFORT WOMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**RARA RASYKA RASENDRIYA  
07041281722115**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**“KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN PADA MASA  
PEMERINTAHAN PRESIDEN MOON JAE IN TERHADAP JEPANG  
DALAM KASUS COMFORT WOMEN”**

Oleh :

**Rara Rasyka Rasendriya**

**07041281722115**

Pembimbing I

1 Dra. Retno Susilowati, MM.

NIP. 199208272019031005

Tanda Tangan

  
-----

Tanggal

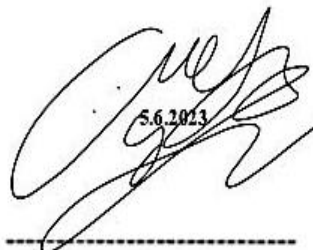
31-5-2023

-----

Pembimbing II

2 Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A

NIP. 198405182018031001

  
-----

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Moon Jae In Terhadap Jepang Dalam Kasus *Comfort Women*”**

Skripsi

Oleh :

Rara Rasyka Rasendriya

07041281722115

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 7 Juni 2023

Pembimbing :

1. Dra. Retno Susilowati, MM.  
NIP. 199208272019031005

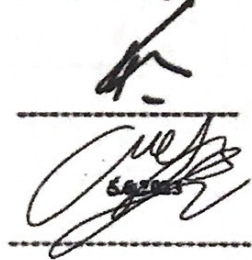
2. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A  
NIP. 198405182018031001

Penguji :

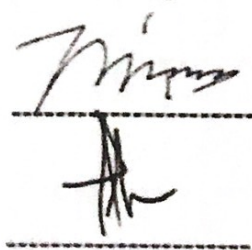
1 Dr. Zulfikri Suleman, M.A  
NIP. 195907201985031002

2 Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A  
NIP. 199104092018032000

Tanda Tangan

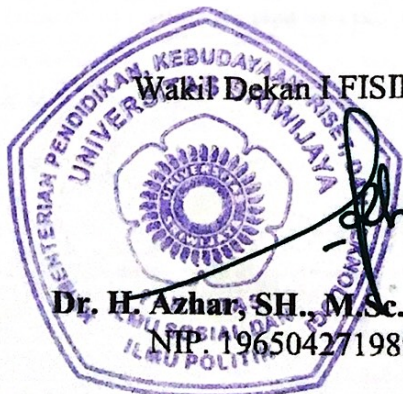


Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Wakil Dekan I FISIP UNSRI,

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Rasyka Rasendriya  
NIM : 07041281722115  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Moon Jae In Terhadap Jepang Dalam Kasus *Comfort Women*” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 25 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Rara Rasyka Rasendriya

07041281722115

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan:

1. Untuk kedua orangtuaku yang selalu mendukung dalam situasi apapun baik susah maupun senang.
2. Untuk adik - adikku yang selalu menjadi *emotional support*.
3. Untuk sahabat dan teman-teman Hubungan Internasional Indralaya angkatan 2017 yang bersedia menemani perjuangan perkuliahan selama ini
4. Untuk Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terutama Ibu Retno dan Bapak Yusuf selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi ini
5. Untuk perdamaian dunia.

## ABSTRAK

Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang kelim dikarenakan adanya sistem *comfort women*. Pada tahun 2015, pertemuan bilateral Korea Selatan dan Jepang menghasilkan '*comfort women agreement 2015*' yang dipercaya menjadi resolusi yang sah untuk penyelesaian kasus ini. Sejak terpilihnya Moon Jae-in sebagai Presiden Korea Selatan, sikap yang tegas kepada Jepang merupakan langkah dari kebijakan luar negeri Korea Selatan. Namun, pada akhir masa kepemimpinannya, ia mengatakan ingin memperbaiki hubungan dengan Jepang. Penelitian ini berfokus kepada apa faktor-faktor determinan yang mempengaruhi perubahan dinamika Presiden Moon Jae-in selaku pembuat keputusan tentang kebijakan luar negeri terhadap Jepang dalam kasus *comfort women*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data dan menganalisisnya. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka melalui data sekunder seperti buku, jurnal, dan situs resmi pemerintah. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa ada faktor-faktor determinan pada perubahan sikap Presiden Moon Jae-in dalam membuat kebijakan luar negeri seperti yang dikemukakan oleh Richard Synder yaitu kondisi internal seperti mengetahui bagaimana politik domestik yang didominasi oleh Partai Demokrat Korea dan opini publik di Korea Selatan, serta kondisi eksternal seperti Dewan Wanita, Jepang dan Amerika Serikat yang merupakan faktor perubahan dinamika kebijakan luar negeri Presiden Moon Jae In dalam kasus *comfort women* pada akhir kepemimpinannya.

**Kata kunci: Comfort Women, Moon Jae In, Kebijakan Luar Negeri**

Indralaya, 7 Juni

2023

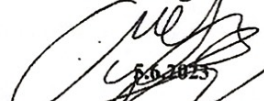
Mengetahui,

Pembimbing 1



**Dra. Retno Susilowati, MM.**  
NIP. 195905201985032003

Pembimbing 2



**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A**  
NIP. 198405182018031001

Disetujui oleh,  
Ketua Program Studi

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197705122003121003

## ABSTRACT

South Korea and Japan are two countries that have a bad relationship due to the comfort women system. In 2015, bilateral meetings between South Korea and Japan resulted in the 'comfort women agreement 2015' which is believed to be a valid resolution for the settlement of this case. Since the election of Moon Jae-in as President of South Korea, a firm stance towards Japan is a step of South Korea's foreign policy. However, at the end of his term, he said he wanted to improve relations with Japan. This study focuses on what are the determinants factor that influence the change in dynamics of President Moon Jae-in as a decision-maker on foreign policy towards Japan in the case of comfort women. This research uses qualitative research methods, by collecting data and analyzing it. Data is collected by library study techniques through secondary data such as books, journals, and official government websites. The results of this study explain that there are determinants of President Moon Jae-in's changing attitude in making foreign policy as stated by Richard Synder, namely internal conditions such as knowing how domestic politics are dominated by the Democratic Party of Korea and public opinion in South Korea, also external conditions such as the Women's Council, Japan and the United States which are factors in changing the dynamics of President Moon Jae In's foreign policy in the case of comfort women at the end of his leadership.

**Keywords: Comfort Women, Moon Jae In, Foreign Policy**

Indralaya, 7 Juni 2023

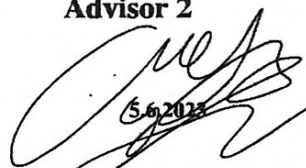
Acknowledge by,

Advisor 1



**Dra. Retno Susilowati, MM.**  
NIP. 199208272019031005

Advisor 2



**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A**  
NIP. 198405182018031001

Approved by,  
Head of the Department



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In terhadap Jepang dalam kasus *comfort women*. Shalawat serta salam sejahtera semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW , keluarga serta para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hubungan Internasional.

Penelitian skripsi ini tidak lepas dari dinamika konflik antara Korea Selatan dan Jepang yang terjadi semenjak masa perang dunia ke-II yang mengalami perubahan sejak terpilihnya presiden Moon Jae-in sebagai presiden Korea Selatan pada tahun 2017. Dengan gagasan awalnya bahwa kesepakatan *comfort women* 2015 harus ditinjau kembali. Namun, ketika akhir tahun kepemimpinannya, gagasan Presiden Moon berubah menjadi ingin menguatkan kembali hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang.

Dalam proses penelitian skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin berterimakasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan materi maupun moril kepada penulis untuk kelancaran penelitian skripsi ini.



Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang terus memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta pengurus Dekanat lainnya.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dra. Retno Susilowati sebagai dosen pembimbing 1 yang sudah menyempatkan waktu , saran , serta dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini
7. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP. MA sebagai dosen pembimbing 2 yang telah memberikan waktu , arahan , serta dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA sebagai dosen pembahas skripsi yang memberikan kritik serta saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini
9. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A selaku pembahas skripsi yang memberikan kritik serta saran dalam penulisan skripsi ini
10. Keluarga Bahagia yang telah mendukung serta menemani penulis dalam berbagai lika – liku perkuliahan serta berbagi permasalahan yang dihadapi: Reka, Alin, Puput, Ejak, Ferian, Gilang, Firly, dan Fauzan.
11. Sonya selalu memberikan solusi terkait penulisan skripsi dan Amel yang memotivasi penulis untuk segera lulus.
12. MMNR yang selalu memberikan motivasi dan memberikan dukungan kepada penulis di hari sidang.

13. KAAAY, RANINI, dan echa yang memberikan semangat yang luar biasa sehingga penulis cepat mengerjakan revisian

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Salam Sejahtera.

Palembang 2 Juni 2023

Rara Rasyka Rasendriya

## Daftar Isi

<b>Halaman Persetujuan Skripsi .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Tim Penguji .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pernyataan Orisinalitas.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>Bab 2 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kerangka Konseptual .....	14
2.3 Alur Pemikiran .....	17
2.4 Hipotesis .....	18
<b>Bab 3 Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
3.1 Desain Penelitian .....	19
3.2 Definisi Konsep .....	19
3.3 Fokus Penelitian .....	21
3.4 Unit Analisis .....	22
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	23
3.8 Teknik Analisis Data .....	23
<b>Bab 4 Gambaran Umum.....</b>	<b>24</b>
4.1 Sejarah Comfort Women di Korea Selatan .....	24
4.2 Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan .....	28
4.3 Rezim Pemerintahan Presiden Moon Jae In .....	30

<b>Bab 5 Hasil dan Pembahasan</b> .....	<b>33</b>
5.1 Kondisi Internal .....	33
5.1.1 Politik Domestik .....	33
5.1.2 Opini Publik .....	34
5.2 Kondisi Eksternal .....	39
5.3.1 Organisasi Non-Pemerintah .....	40
5.3.1.1 Yoon Mi Hyang sebagai perwakilan proporsional .....	44
5.3.1.2 Pembongkaran Patung Perdamaian .....	45
5.3.1.3 Penggalangan dana untuk para penyintas .....	45
5.3.2 Negara Tetangga .....	46
5.3.3 Negara Aliansi .....	50
<b>Bab 6 Penutup</b> .....	<b>54</b>
6.1 Kesimpulan .....	54
6.2 Saran .....	55
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>57</b>

## **Daftar Tabel**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 1.2 Fokus Penelitian .....	21
Tabel 1.3 Jadwal Penelitian .....	23

## Daftar Gambar

Gambar 2.1 <i>Decision-making process</i> .....	15
Gambar 2.2 Alur Pemikiran .....	17
Gambar 5.1 Pesan Presiden Moon .....	35
Gambar 5.2 Penilaian Tengah Semester Pemerintah Moon Jae-in .....	36
Gambar 5.3 Isu Prioritas dalam Kebijakan Luar Negeri dengan Jepang.....	37
Gambar 5.4 Tanggapan dan sikap pemerintah Moon Jae-in terhadap kebijakan Jepang (dari 10) .....	38
Gambar 5.5 Jajak pendapat respon publik Korea Selatan perihal Kesepakatan Comfort Women pada tahun 2015 .....	38
Gambar 5.6 Patung Gadis Perdamaian .....	43
Gambar 5.7 Presiden Donald Trump memeluk mantan korban comfort women pada perjamuan makan malam di Gedung Biru .....	52

## Daftar Lampiran

Lampiran 1 Hasil Pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan-Jepang 28 Desember 2015 .....	64
Lampiran 2 Pernyataan Perdana Menteri Tomiichi Murayama tentang "Inisiatif Perdamaian, Persahabatan, dan Pertukaran" 31 Agustus 1994 .....	67
Lampiran 3 Surat dari Perdana Menteri untuk Mantan Wanita Penghibur 1996 .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara bertetangga yang memiliki persamaan nilai budaya dan geografis. Kedua negara tersebut juga merupakan aliansi dari Amerika Serikat. Hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In mengalami pasang surut terkait dengan keluhan historis di antara kedua negara sejak hubungan diplomatik mereka berlangsung. Kekejaman Jepang terhadap masyarakat Semenanjung Korea pada masa sebelum dan perang dunia kedua menjadikan Korea Selatan sampai saat ini meminta pertanggungjawaban Jepang. Karena selama Jepang menduduki Korea, mereka banyak membuat peraturan yang kejam dan tidak bermoral seperti terbentuknya sistem *comfort women* yang menjadi cikal bakal sulitnya kedua negara yang bertetangga ini untuk akur.

*Comfort Women* merupakan perempuan dewasa maupun anak-anak perempuan yang dieksploitasi dan ditipu dengan janji pekerjaan namun berakhir dikirim ke rumah bordil militer untuk memberikan layanan seksual kepada kekaisaran militer Jepang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun selama Perang Asia-Pasifik (1931 – 1945) (Yoshiaki, 2018). Mereka yang menjadi korban dari kekejaman militer Jepang mendapat perlakuan kasar serta mengalami kekerasan seksual.

*Comfort Women* ini bukan hanya berasal dari perempuan Korea namun Jepang, Taiwan, Tiongkok, dan perempuan di wilayah yang diduduki sementara oleh kekaisaran Jepang ikut menjadi korban sistem ini. (Nishino, 2018) Sekitar 200.000 wanita yang direkrut secara paksa oleh tentara kekaisaran Jepang di bawah panji *Chongsindae* (Korps Layanan Tenaga Kerja "Sukarela"). Istilah "*comfort women*" akan digunakan di seluruh proposal ini karena pengakuan internasional dengan istilah di Korea (위안부) atau *wianbu*, di Jepang (慰安婦) atau *ianfu*, dan di media massa global.

Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia ke-II, para korban melalui masa sulit seperti disalahpahami sebagai perempuan yang tidak baik. Setiap wanita diduga melayani rata-rata 30-40 pria setiap hari. Banyak yang meninggal karena penyakit menular seksual dan mereka yang berhasil bertahan hidup melalui kekejaman dan kembali ke Korea diperlakukan seperti penjahat oleh keluarga mereka dan masyarakat Korea yang patriarkinya kuat. Banyak dari mereka terpaksa menyembunyikan kehidupan masa lalu



mereka dan mencoba menjalani kehidupan normal, bersembunyi di pengasingan dan hidup sendiri selama sisa hidup mereka, atau tidak pernah kembali ke tanah air mereka.

Dikarenakan isu *comfort women* belum menjadi permasalahan antara Korea dan Jepang sampai pada tahun 1991, Kim Hak Sun berani berbicara tentang pengalamannya menjadi “*comfort women*”. Ia mengajukan gugatan kepada Jepang terhadap perlakuan yang dideritanya saat masa perang. Namun, Jepang tidak bersedia untuk bertanggung jawab. Pada tahun 1992, ditemukan dokumen Angkatan Darat Kekaisaran oleh seorang sejarawan bernama Yoshimi Yoshiaki. Di mana dokumen itu memperlihatkan bukti keterlibatan langsung kekaisaran dan militer Jepang dalam sistem “*Comfort Women*” (Yoshiaki, dikutip dari Kim 2020). Dengan adanya bukti itu, perdana menteri kekaisaran Jepang, meminta maaf kepada para korban.

Tidak berhenti di situ, permasalahan ini terus berlangsung bahkan setelah lebih dari 20 tahun sejak pertama kali Kim Hak Sun menyuarkan isu ini. Hal itu tentu saja menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan luar negeri di kedua negara yang bersangkutan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Pemimpin terdahulu Korea Selatan dan Jepang sudah berupaya untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti pada tanggal 31 Agustus 1994, Perdana Menteri Tomiichi Murayama yang menyatakan permintaan maaf untuk para korban pada masa kolonial Kekaisaran Jepang. (Ministry of Foreign Affairs Japan, 1994) Lalu di tahun 1996, Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto mengirimkan surat permintaan maaf mewakili Jepang. (Asian Women’s Fund Japan, 1996)

*Comfort Women Agreement 2015* merupakan bentuk upaya yang dilakukan kedua negara itu untuk memperbaiki hubungan diplomatik mereka yang rumit. Berikut ini merupakan hasil pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang pada tanggal 28 Desember 2015 yang menghasilkan kesepakatan terkait isu *Comfort Women*:

- ① Pemerintah Korea mengevaluasi deklarasi pemerintah Jepang dan langkah-langkah menjelang pengumuman ini, dan, dengan premis bahwa pemerintah Jepang akan dengan setia menerapkan langkah-langkah yang diungkapkan sebelumnya, melalui pengumuman ini, bersama dengan pemerintah Jepang, masalah ini akan diselesaikan sebagai final dan tidak dapat diubah. Konfirmasi bahwa itu akan diselesaikan dengan pemerintah Korea akan bekerja sama dengan langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah Jepang.
- ② Pemerintah Korea, mengakui bahwa pemerintah Jepang prihatin dengan patung seorang gadis di depan Kedutaan Besar Jepang di Korea, dari sudut pandang menjaga perdamaian dan martabat misi diplomatik, pemerintah Korea dapat dengan tepat menanggapi melalui konsultasi dengan organisasi terkait, dll.

③Pemerintah Korea, bersama dengan pemerintah Jepang, akan menahan diri dari menuduh dan mengkritik satu sama lain tentang masalah ini di masyarakat internasional, termasuk PBB, di masa depan, dengan premis bahwa langkah-langkah yang diungkapkan oleh pemerintah Jepang akan dilaksanakan dengan setia. (*Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea*, 2015)

Meskipun kesepakatan ini merupakan resolusi “final dan tidak dapat dibatalkan” namun realitanya tak dapat menyelesaikan konflik antara kedua negara dikarenakan opini publik yang sangat negatif dan kurangnya dukungan dari korban mantan “*comfort women*”. Kesepakatan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Park menegaskan perasaan banyak orang Korea Selatan bahwa pemerintahan Jepang hanya ingin masalah ini dilupakan. Ada sedikit antusiasme publik untuk atau penerimaan kesepakatan dan reaksi meningkat ketika pemerintah Jepang yang saat itu dipimpin Shinzo Abe sebagai perdana menteri bersikeras agar Seoul mencegah kelompok-kelompok sipil memasang patung-patung kenangan *comfort women*. Jepang menilai bahwa dengan kompensasi yang mereka berikan berarti kasus “*comfort women*” ini sudah selesai (Japan completes transfer of ¥1 billion to South Korean 'comfort women' fund, 2016).

Moon Jae In selaku Presiden ke-19 Korea Selatan yang dilantik pada tanggal 10 Mei 2017 dinilai sebagai “kandidat bersih” oleh pemilihnya. Rekam jejaknya yang bersih dengan memulai karirnya sebagai pengacara aktivis hak asasi manusia dan pro-demokrasi. Moon Jae In lahir dari keluarga miskin yang melarikan diri dari rezim komunis Korea Utara. Namun, Moon kecil merupakan anak yang cerdas, ia diterima di sekolah yang bergengsi di Busan, Sekolah Menengah Gyeongnam. Ketika belajar hukum di Universitas Kyunghee, ia memimpin protes terhadap Presiden Park Chung-hee yang mengakibatkan dua kali penangkapan pada demonstrasi. Pada tahun 1982, Moon berhasil lulus untuk kedua kalinya pada Lembaga Penelitian dan Pelatihan Yudisial. Namun, ia didiskualifikasi menjadi hakim karena terlibat protes anti-pemerintah (Ott, 2017)

Pada 2015, Moon mengambil alih sebagai ketua Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi, yang berubah menjadi Partai Demokrat Korea. Pada akhir 2016, setelah muncul berita tentang hubungan Presiden Park yang tidak pantas dengan orang kepercayaan lama, Moon berada di garis depan protes yang menyerukan penggulingan presiden, yang mengarah pada pemakzulan dan pencopotan resmi Presiden Park Geun-hye dari jabatannya pada 10 Maret 2017. Moon dengan cepat muncul sebagai kandidat utama

untuk mengambil alih kursi kepresidenan yang kosong. Dia menjanjikan kesepakatan yang tegas tetapi sabar dengan taktik Korea Utara yang semakin agresif, mengungkapkan harapan di semenanjung yang bersatu kembali dan berjanji untuk memberlakukan rencana stimulus untuk memerangi tingkat pengangguran yang meningkat (Ott, 2017).

Pada 9 Mei 2017, Moon hampir menggandakan suara saingan terdekatnya untuk memenangkan pemilihan presiden Korea Selatan ke-19. Dengan total suara 41,08% unggul dari dua pesaingnya yaitu Hong Jun Pyo dan Ahn Cheol Soo (Kwon, Boykoff, & Griffiths, 2017). Pada awal pemerintahannya, Presiden Moon berhadapan dengan tantangan tiga kebijakan luar negeri dari pendahulunya yaitu Presiden Park Geun Hye. Tiga kebijakan luar negeri itu adalah *Comfort Women Agreement 2015* dengan Jepang, penutupan kompleks industri Kaesong dengan Korea Utara dan pengerahan baterai pertahanan rudal THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) dengan Tiongkok. Di mana saat pemakzulan Presiden Park, Presiden Moon berkampanye menolak tiga keputusan itu (Delury, 2018). Ia mengkritik bahwa kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang terkait *Comfort Women* bukan solusi final karena yang diinginkan korban adalah pemerintah Jepang bertanggung jawab secara hukum serta meminta maaf dan memberikan kompensasi secara resmi (Jung, 2021).

Sebagai presiden baru, tentu saja permasalahan ini merupakan tantangan luar biasa yang harus dilalui Presiden Moon untuk membuktikan kinerjanya dan menunjukkan ia pro dengan rakyat. Dengan memasukan suara publik dalam semua aspek pemerintahan termasuk pada kebijakan luar negeri. Salah satunya dengan cara menciptakan sistem petisi online yang berguna untuk mengatasi masalah yang sensitif. Tidak hanya itu, dalam kasus “*comfort women*”, pemerintahan Moon Jae-in menggambarkan kesepakatan pada tahun 2015 sebagai "cacat serius," dan setelah itu hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang mencapai ke titik terendah dalam beberapa tahun.

Pada isi kesepakatan tahun 2015 itu, pihak Jepang menginginkan patung seorang gadis yang menjadi lambang “*comfort women*” dipindahkan dari depan Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan karena menghalangi misi perdamaian diplomatik dan Korea Selatan akan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini kepada organisasi terkait. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Moon, yang diwakilkan oleh menteri luar negeri Korea Selatan yang baru menjabat pada tahun 2017, Kang Kyung-Wha mengkritik keinginan Jepang untuk memindahkan patung yang menjadi simbol perjuangan para

mantan “*comfort women*” di Korea. Oleh karena itu, ia membuat gugus tugas untuk meninjau kembali isi kesepakatan dengan Jepang pada Desember 2015 lalu (Hwang, 2017).

Pada tanggal 28 Desember 2017, Presiden Moon juga mengkritik bahwa di kesepakatan itu masih terdapat kekurangan yang signifikan dan tidak berpusat kepada pendapat korban. Mengikuti perkataan Presiden Moon, pemerintahan Korea Selatan tidak ingin bernegosiasi ulang terhadap kesepakatan dengan Jepang yang dilakukan pada masa pemerintahan presiden Park agar dapat fokus menyembuhkan luka korban (Kang, 2018). Hal itu membuat pemerintahan Korea Selatan mengambil keputusan untuk mengembalikan dana yang diberikan Jepang kepada yayasan yang menangani dana untuk mantan “*comfort women*” di Korea Selatan (Yosuke, 2018). Tentu saja hal ini membuat panas hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan.

Isu *comfort women* ini masih menjadi isu hangat di Korea Selatan karena semenjak tahun 2018, di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae In, setiap tanggal 14 Agustus merupakan hari peringatan untuk korban dari kejahatan tentara kekaisaran militer Jepang terhadap para perempuan dan anak perempuan di Korea Selatan.

Pasal 11-2 (Hari Peringatan Wanita Penghibur Korban Militer Jepang)

(1) Dalam rangka mempublikasikan isu isu perempuan penghibur yang dikeluarkan di dalam dan luar negeri dan untuk memperingati para korban wanita penghibur di militer Jepang, 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Peringatan Korban Wanita Penghibur Militer Jepang.

(2) Pemerintah Negara bagian dan daerah harus berusaha untuk melakukan acara dan publisitas sejalan dengan tujuan Hari Peringatan Wanita Penghibur Korban Militer Jepang berdasarkan ayat (1). (The Ministry of Gender Equality and Family Republic of Korea, 2018)

Pada tahun 2018 juga, Moon Jae-in mengundang 8 wanita mantan *comfort women* ke *Blue House* guna melihat reaksi wanita-wanita itu terhadap posisi pemerintahan dalam kesepakatan itu (Kim, 2018). Ini adalah kedua kalinya mantan “*comfort women*” mengunjungi *Blue House* selama masa kepresidenan Moon setelah Lee Yong-soo, seorang korban diundang untuk makan malam pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Korea Selatan pada November 2017 (McCurry, 2017). Diikuti pada tahun 2021, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Choi Jong-kun mengunjungi kota-kota tenggara Daegu dan Pohang untuk bertemu dengan para penyintas kejahatan Jepang selama pemerintahan kolonial Korea yang secara halus disebut “*comfort women*” (Kim, 2021)

Pada masa pemerintahannya, Presiden Moon akan selalu diminta kebijakannya dalam menangani kasus “*comfort women*” oleh publik dan partai oposisi. Di mana partai oposisi mempertanyakan janji semasa kampanye Presiden Moon dalam menangani kasus ini. Namun, tentu saja dalam mengambil suatu keputusan, Presiden Moon Jae In selaku aktor negara tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya.

Pada saat Konferensi Pers tahun baru 2021, Presiden Moon membuat pernyataan yang berbeda ketika kampanye atau pada masa awal jabatannya. Pada pidatonya, ia mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan melakukan upaya untuk pengembangan hubungan Korea-Jepang yang berorientasi masa depan. (Blue House Korea, 2021) Tidak hanya itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang, Kang Chang-il mengatakan bahwa negaranya siap untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang setelah hubungan bilateral kedua negara mencapai titik terendah pascaperang. (Takeshi, 2021)

Dengan adanya pernyataan yang berbeda dari tahun sebelumnya tentu menimbulkan pertanyaan yang menjadikan rumusan masalah di skripsi ini. Dinamika perubahan kebijakan luar negeri Presiden Moon dalam kasus *comfort women* yang terjadi ketika menuju akhir kepemimpinannya menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, partai oposisi, organisasi yang menaungi *comfort women* dan tentu saja para korban.

Korea Selatan dan Jepang yang memiliki banyak persamaan mulai dari sesama penganut demokrasi liberal, hubungan ekonomi bertetangga, dan sama-sama berada dalam ancaman Korea Utara ini memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan diplomatik mereka yang renggang. Namun, dikarenakan permasalahan dan kenangan historis yang pahit saat Perang Dunia ke-II menjadikan kedua negara ini sulit untuk menggapai hubungan yang damai.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Supaya pembahasan tidak terlalu luas, lebih terarah, dan mudah dipahami, penulis memutuskan untuk hanya membahas kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan presiden tertentu. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

*“Apa Faktor Determinan yang Mempengaruhi Dinamika Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Moon Jae-in Terhadap Jepang dalam Kasus Comfort Women?”*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Korea Selatan pada masa Presiden Moon Jae In dalam kasus Comfort Women
2. Mendeskripsikan faktor determinan apa saja yang mempengaruhi dinamika perubahan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Moon Jae In dalam kasus Comfort Women
3. Mendeskripsikan pengaruh yang timbul dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Presiden Moon Jae In dalam kasus Comfort Women

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis**

Menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian serupa dan juga besar harapan penulis agar penelitian ini akan menjadi acuan serta sumber informasi bagi peneliti lainnya dalam kasus yang serupa.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis**

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang kebijakan luar negeri serta kasus comfort women.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

## Daftar Pustaka

- Alderman, D. H. (2003). Street names and the scaling of memory: The politics of commemorating Martin Luther King, Jr within the African American community. *Area*, 35(2), 163-173.
- Alter, S. (1999). *Apologising for Serious Wrongdoing: Social, Psychological and Legal Considerations*. Ottawa: Law Commission of Canada.
- Anderson, P. A. (1987). What Do Decision Makers Do When They Make a Foreign Policy Decision? The Implications for the Comparative Study of Foreign Policy. dikutip dari Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr., dan Rosenau, J. N. (Ed.). *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston, Unwin, hal. 285-308.
- Arrington, C. (2018, January 11). South Korea ended its review of its 'comfort women' deal with Japan. Here's what you need to know. *The Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/01/11/south-korea-ended-its-review-of-its-comfort-women-deal-with-japan-heres-what-you-need-to-know/>
- Asian Women's Fund. (1996). *Letter from Prime Minister to the Former Comfort Women*. Tokyo: Japan Government.
- Asian Women's Fund. (2005). *Moral Responsibility and Reconciliation*. Tokyo: Japan Government.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *jurnal teknologi pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Bemma, A. (2017, September 8). South Korea: World's longest protest over comfort women. Aljazeera. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2017/9/8/south-korea-worlds-longest-protest-over-comfort-women>
- Blue House Korea. (2021). 2021 New Year Press Conference. *KOREA NEWS*. Diakses dari <https://www.korea.kr/news/blueHouseView.do?newsId=148882793>
- Bong, S. H. (2005). Compensation for Victims of Wartime Atrocities: Recent Developments in Japan's Case Law. *Journal of International Criminal Justice*. 3 (1), 187–206. DOI: 10.1093/jicj/mqi002
- Bosco, F. J. (2004). Human rights politics and scaled performances of memory: Conflicts among the Madres de Plaza de Mayo in Argentina. *Social & Cultural Geography*, 5(3), 381-402.
- Brazinsky, G. A. (2019, Agustus 19). How Japan's failure to atone for past sins threatens the global economy, *The Washington Post*, h.2.

- Chae, Y. T. (2015, Desember 31). yeo "nomuhyeon jeongbu, wianbu munje hoepi..mundo chaeg-im iss-eo". *Daum News*. Diakses dari <https://v.daum.net/v/20151231115621523#page=1&type=media>
- Choi, W. J. & Seo, S. H. (2019). An Exploratory Approach on the Type of President's Image for Developing PI Strategy: Focused on the Comparison of Image among 'Ro Moo-hyun', 'Moon Jae-in' and 'Ideal President'. *jugwanseong yeongu*. 45, 5-21. DOI: 10.18346/KSSSS.45.1
- Constante, A. (2019, Mei 7). Who are the 'comfort women,' and why are U.S.-based memorials for them controversial?. *NBC News*. Diakses dari <https://www.nbcnews.com/news/asian-america/who-are-comfort-women-why-are-u-s-based-memorials-n997656>
- Delury, J. (2018). The Candlelight Mandate and Moon Jae-in's Inter-Korean Dilemma. Dalam Rozman, G. (Ed.). *A Whirlwind of Change in East Asia: Assessing Shifts in Strategy, Trade, and The Role of North Korea* (h. 50-71). Amerika Serikat: Korea Economic Institute of America
- Duignan, B. (2022, November 16). Joe Biden. *Encyclopedia Britannica*. Diakses dari <https://www.britannica.com/biography/Joe-Biden>
- Fifield, A. (2015, Februari 9). U.S. academics condemn Japanese efforts to revise history of 'comfort women'. *The Washington Post*. Diakses dari [https://www.washingtonpost.com/world/asia\\_pacific/american-academics-condemn-japanese-efforts-to-revise-history-of-comfort-women/2015/02/09/e795fc1c-38f0-408f-954a-7f989779770a\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/american-academics-condemn-japanese-efforts-to-revise-history-of-comfort-women/2015/02/09/e795fc1c-38f0-408f-954a-7f989779770a_story.html)
- French, E., Kim, J., & Yu, J. (2021, Januari 14). The US Role in South Korea-Japan Relations: From Johnson to Biden. *The Diplomat*. Diakses dari <https://thediplomat.com/2021/01/the-us-role-in-south-korea-japan-relations-from-johnson-to-biden/>
- Full text of announcement on 'comfort women' issue by Japanese, South Korean foreign ministers. (2015). Diakses pada 6 Oktober 2021, dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/28/national/politics-diplomacy/full-text-announcement-comfort-women-issue-japanese-south-korean-foreign-ministers/>
- Glosserman, B. (2019). South Korea-Japan relations. Dalam Milani, M., Fiori, A., & Dian, M (Ed.). *The Korean Paradox: Domestic Political Divide and Foreign Policy in South Korea* (h. 133). New York: Routledge.
- Government of the Republic of Korea. (2017). *The Top 100 National Tasks*. Seoul: Government of the Republic of Korea
- Han, S. H. (2020). Stifled by freedom of expression: The "Statue of a Girl of Peace" and the legacy of colonialism and historical revisionism in Japan. *First Amendment Studies*. 54(2), 1-13. DOI: 10.1080/21689725.2020.1837651



- Heo, Y. (2018). Ilbongun wianbu jaehyeongwa jinjeongseongui gongyeong [The problem of representation and authenticity for 'comfort women' of the Japanese military sexual slavery: Focused on the girl and grandmother image]. *Women and History*, 29, 131–163. DOI: 29.201812.131
- Herek, G. M., Janis, I. L., & Huth, P. (1987) Decision-Making During International Crises: Is Quality of Process Related to Outcome?. *Journal of Conflict Resolution* 31 (2), 203-226
- Hermann, M.G. (1980) Explaining Foreign Policy: Using Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24 (1), 7-46.
- Hudson, V. M. (2002). Foreign Policy Decision: A Touchstone for International Relations Theory in the Twenty-First Century. Dalam Sapin, B. M. *Foreign policy decision-making (revisited)* (h. 1-20). New York: Palgrave Macmillan
- Hwang, G. (2017). Kang Kyung-wha: “The more Japan demands for the statue to be relocated, the more it will increase. Diakses pada 6 Oktober 2021, dari <https://www.insight.co.kr/newsRead.php?ArtNo=113370>
- Japan completes transfer of ¥1 billion to South Korean 'comfort women' fund. (2016). *Japan Times*. Diakses pada 6 Oktober 2021, dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/01/national/politics-diplomacy/japan-completes-transfer-%C2%A51-billion-south-korean-comfort-women-fund/>
- Japan Rejects Calls to Teach About ‘Comfort Women’ in School Textbooks. (2018, Maret 8). *Korea Bizwire*. Diakses dari <http://koreabizwire.com/japan-rejects-south-koreas-request-to-teach-about-comfort-women-in-textbooks/113336>
- Japanese gov't protests invitation of former 'comfort woman' to Trump banquet, (2017, November 8). *The Mainichi Japan*. Diakses dari <https://mainichi.jp/english/articles/20171108/p2a/00m/0na/007000c>
- Jensen, L. (1982). Explaining Foreign Policy. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, hal. 7.
- Jepang tarik duta besarnya terkait patung 'budak seks' di Korea Selatan. (2017, Januari 6). *BBC News Indonesia*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527303>
- Jo, J. H. (2017, Juni 7). Kang Kyung-wha "It's something that only comes up in a military agreement"...Strong Criticism of the Comfort Women Agreement (Comprehensive). *Yonhap News*. Diakses dari <https://www.yna.co.kr/view/AKR20170607077651014>
- Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3 (3), 619-626. Diakses dari <http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/169>

- Jung, I. H. (2021, Januari 18). President Moon Jae-in's shaken principles... "Comfort women verdict is embarrassing,". *ETODAY KOREA*. Diakses dari <https://www.etoday.co.kr/news/view/1985741>
- Kang, H. M. (2018, November 27). South Korea Decides to Dismantle 'Comfort Women' Reconciliation and Healing Foundation. *The Diplomat*. Diakses dari <https://thediplomat.com/2018/11/south-korea-decides-to-dismantle-comfort-women-reconciliation-and-healing-foundation/>
- Kang, H. W. (2018, November 21). Reconciliation and Healing Foundation Officially Disbanded..Korea-Japan Relations Walking on Thin Ice. *00NEWS*. Diakses dari <http://www.00news.co.kr/news/articleView.html?idxno=55617>
- Kang, S. W. (2018, Januari 9). Moon Jae-in government urges 'genuine apology' instead of breaking the comfort women agreement. *Media Today Korea*. Diakses dari <http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=140697>
- Kang, T. H. (2016, Januari 01). The Minjoo "Comfort women negotiations nullified without the consent of the National Assembly". *The JoongAng*. Diakses dari <https://www.joongang.co.kr/article/19343193#home>
- Kazue, M. (2016). The 'comfort women' issue and the embedded culture of sexual violence in contemporary Japan. *Current Sociology*, 64(4), 620-636.
- Kazuko, W. (1994). Militarism, colonialism, and the trafficking of women: "Comfort women" forced into sexual labor for Japanese soldiers. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*. 26 (4), 3-17. DOI: 10.1080/14672715.1994.10416165
- Kim, C. (2018, Januari 4). South Korea's President Moon meets former 'comfort women'. *Reuters*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-comfortwomen-idUSKBN1ET08Q>
- Kim, C. H. (2017, April 20). "munjaein-eun chaghansalam-ida" imiji bunseoggaga bon daeseonjujadeul [munjaein pyeon] "Moon Jae-in is a good person" presidential candidates as seen by image analysts [Moon Jae-in edition]. *Gukjjesinmun*. Diakses dari <http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0100&key=20170420.99002100830>
- Kim, C. & Kim, S. S. (1997). Delayed justice: The case of the Japanese imperial military sex slaves. *UCLA Pac. Basin LJ*, 16, 263.
- Kim, D. L. (2015, Desember 30). Korea-Japan agreement on "comfort women" spreads criticism. Journalists Association of Korea. Diakses dari [http://www.journalist.or.kr/m/m\\_article.html?no=38145](http://www.journalist.or.kr/m/m_article.html?no=38145)
- Kim, E. J. (2021, November 30). Seoul's vice FM meets victims of Japan's wartime sexual enslavement. Yonhap News Agency. Diakses dari <https://en.yna.co.kr/view/AEN20211130006000325?section=search>

- Kim, P. (2017). Hangugui pyeonghwauui sonyeosanggwa taljinsirui jeongchihak [The Girl statue of peace in South Korea and post-truth politics: Reviewing colonialism / male centered nationalism and gender in Japan]. *Hangugyeoseonghak*. 33 (3), 279–322. DOI:10.30719/JKWS.2017.09.33.3.279
- Kim, P. (2020). The “Comfort Women” Redress Movement in Japan: Reflections on the Past 28 years. Dalam *The Transnational Redress Movement for the Victims of Japanese Military Sexual Slavery* (h. 43-70). De Gruyter Oldenbourg.
- Kwon, K. J., Boykoff, P., & Griffiths, J. (2017, Mei 10). South Korea election: Moon Jae-in declared winner. *CNN*. Diakses dari <https://edition.cnn.com/2017/05/09/asia/south-korea-election/index.html>
- Lee, K. T. (2015, Desember 30). munjaein "wianbu hab-ui, gughoe dong-ui eobs-eoss-euni muhyo". *Ohmynews*. Diakses dari [http://www.ohmynews.com/NWS\\_Web/View/at\\_pg.aspx?CNTN\\_CD=A0002171829](http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002171829)
- Matsuo, T. (2020). *The Comfort Women Agreement 5 Years On*. Diakses pada 17 Oktober 2022, dari <https://keia.org/the-peninsula/the-comfort-women-agreement-5-years-on/>
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2021). *Japan's Efforts on the Issue of Comfort Women*.
- Ministry of Foreign Affairs Japan (1994). *Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the "Peace, Friendship, and Exchange Initiative"*.
- Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. (2015). *Outcome of Foreign Ministers' Meetings between Korea and Japan*
- Nishino, R. (2018). Forcible mobilization: What survivor testimonies tell us. Dalam R, Nishino., P, Kim., & A, Onozawa (Ed.). *Denying the Comfort Women* (h. 40-63). London: Routledge.
- Sneider, D. (2020, November 23). Why Biden Will Embrace The American Alliances in Northeast Asia. *The Oriental Economist*. Diakses dari <https://toyokeizai.net/articles/-/390854>
- Sodik, D. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suzuki, T. (2021, Januari 12). Seoul court puts off ruling in ‘comfort women’ suit until March. *The Asahi Shimbun*. Diakses dari <https://www.asahi.com/ajw/articles/14100110>
- Takeshi, K. (2021, Januari 18). South Korean envoy: Moon ready to rebuild ties with Japan. *The Asahi Shimbun*. Diakses dari <https://www.asahi.com/ajw/articles/14115986>
- United Nations Audiovisual Library of International Law. (2005). *General Assembly Resolution 60/147 (Basic Principles and Guidelines on The Right To a Remedy and*

*Reparation For Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. Geneva: United Nations

United Nations Office of The High Commissioner. (2016). *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women examines reports of Japan*. Diakses pada 11 November 2022, dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/02/committee-elimination-discrimination-against-women-examines-reports-japan>

United Nations Office of The High Commissioner. (2016). *Japan / S. Korea: "The long awaited apology to 'comfort women' victims is yet to come" – UN rights experts*. Diakses pada 11 November 2022, dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/03/japan-s-korea-long-awaited-apology-comfort-women-victims-yet-come-un-rights>

USC Libraries. (2021). *Organizing Your Social Sciences Research Paper*. Diakses pada 29 Agustus 2021, dari <https://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework>

Ward, T. J. & Lay, W. D. (2016). The comfort women controversy: Not over yet. *East Asia*, 33(4), 255-269.

Yeo, J. S. (2017, November 8). Trump's hug with comfort woman draws ire from Japan. *The Korea Herald*. Diakses dari <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171108000842>

Yoon, H. & Chang, J. (2021). The Story "Our Grandmothers" Could Not Tell: Representation of the Comfort Women and the Physical Manifestation of Memory. *Azalea: Journal of Korean Literature & Culture*. 14, 311-334. DOI: 10.1353/aza.2021.0018

Yoshiaki, Y. (2018). The Kono Statement: its historical significance and limitations. Dalam Nishino, R., Kim, P., & Onozawa, A (Ed.) *Denying the Comfort Women: The Japanese State's Assault on Historical Truth* (h. 17). Routledge.

Yoshino, T. (2015, Desember 31). 70% of South Koreans in their 20s and 30s agree with Japan-South Korea agreement on comfort women issue (survey results). *The Huffington Post*. Diakses dari [https://www.huffingtonpost.jp/2015/12/31/comfort-women-survey-korea\\_n\\_8898156.html?utm\\_hp\\_ref=japan-world](https://www.huffingtonpost.jp/2015/12/31/comfort-women-survey-korea_n_8898156.html?utm_hp_ref=japan-world)

Yosuke, O. (2018). Scrapping 'comfort women' fund an option, Moon warns Abe. *ASIA NIKKEI*. Diakses dari <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Scrapping-comfort-women-fund-an-option-Moon-warns-Abe>

Zwanenburg, M. (2006). The Van Boven/Bassiouni Principles: An Appraisal. *Netherlands quarterly of human rights*, 24 (4), 641-668. DOI: 10.1177/016934410602400405